

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Deposito Mudharabah

a. Deposito

Deposito ialah sejumlah nominal uang yang diberikan kepada bank sebagai pengamatan, investasi dan agunan di mana nantinya dana yang diberikan kepada bank menjadi milik bank. Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan bank dengan pemberi dana memiliki keterkaitan sebagai pihak yang memiliki hutang dan pihak yang memberi hutang. Sederhananya deposito dapat dikatakan sebagai simpanan yang pengambilan dananya hanya bisa pada saat tertentu, sesuai pemilihan waktu saat pembukaan deposito. Dengan kata lain sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah.¹

Sedangkan untuk jenis deposito yang dilarang oleh syariah Islam adalah jenis deposito yang ada bunganya. Pengertian bunga yaitu tambahan sejumlah nominal atas uang yang telah disimpan atau dipinjam (kredit) di bank. Terdapat tiga jenis simpanan deposito dengan sistem bunga, antara lain:²

1) Deposito Berjangka

Jenis deposito yang pengambilan dananya sesuai dengan pengambilan berapa bulan pada saat pembuatan deposito, biasanya 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan tergantung pada bank yang menerbitkan deposito berjangka. Kelebihan dalam deposito ini terletak pada kesempatan nasabah yang dapat memilih sendiri jangka waktu sesuai kebutuhan, kemudian dapat memilih mata uang lain untuk investasi dan bunga yang terdapat di deposito berjangka dapat besaing dengan bank lain yang secara langsung dapat ditransfer ke nasabah. Untuk perpanjangan deposito berjangka sendiri akan otomatis diperpanjang tanpa pemberitahuan atau penegasan lebih lanjut dari pihak

¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: TERAS, 2012), 150.

² Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 219-220.

deposan dengan nominal bunga yang akan bertambah setiap kali perpanjangan.

Dalam deposito berjangka bank menawarkan dua pilihan perpanjangan kepada nasabah, antara lain:³

- a) Deposito berjangka reguler, artinya jika sudah dalam masa berakhirnya deposito untuk memperpanjang jangka waktunya harus dilakukan setelah nasabah menyetujui perpanjangan deposito di bank tersebut.
- b) Deposito berjangka otomatis, pada pilihan deposito ini perpanjangan atas masa waktu deposito akan dilakukan secara otomatis tanpa nasabah melakukan perpanjangan mandiri dan untuk masa waktunya akan mengikuti pada saat pembukaan deposito (*Automatic Roll Over*).

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah hasil dari pembaruan dari jenis deposito berjangka. Yang artinya bahwa jenis deposito ini merupakan deposito berjangka yang sistemnya dapat dijualbelikan. Atas unjuk saat penarikan dapat dilakukan agar sertifikat ini dapat dijualbelikan dengan bebas. Karena saat terdapat atas unjuk maka siapa saja yang memiliki sertifikat tersebut dapat mencairkannya pada saat jatuh tempo. Selain dapat diperjualbelikan, ciri lain yang melekat pada jenis deposito ini adalah pembayaran bunganya. Di mana dalam jenis deposito ini bunga harus dibayar di muka pada saat nasabah menyimpan uangnya pertama kali, berbeda dengan deposito berjangka yang bunganya harus dibayar saat dana sudah mengendap. Jadi dapat dikatakan bahwa sertifikat deposito memiliki ciri antara lain:⁴

- a) Masa jangka waktunya diantara 2, 3, 6 hingga 12 bulan.
- b) Penerbitan atas unjuk.
- c) Dapat dimiliki oleh orang lain yang membeli sertifikat deposito ini.
- d) Bunga yang dihasilkan dari penyimpanan uangnya dapat dicairkan dimuka dalam bentuk tunai maupun non-tunai (selain saat jatuh tempo maupun pada setiap bulannya).

³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usaki, 2019), 154.

⁴ Yuliani, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Palembang: CV. Citrabooks Indonesia, 2021), 39.

3) Deposito *On Call*

Jika nasabah yang memiliki uang dalam jumlah yang besar dapat menyimpan uangnya dalam bentuk *deposito on call*. Untuk nominal berapa yang dapat dimasukkan dalam deposito on call tergantung kepada masing-masing bank yang mempunyai produk ini. Masa penyimpanan uangnya dapat selama 1 minggu (minimal) atau selama 1 bulan (tidak lebih). Jenis deposito ini diterbitkan atas nama dengan pembayaran bunga sama waktunya dengan pencairan *deposito on call*. Tetapi dalam pencairannya nasabah harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada bank atas pencairan yang ingin dilakukannya (kurang lebih 3 hari sebelumnya). Untuk nominal bunganya sendiri dapat melalui negosiasi kepada bank dan yang pasti bunga tersebut dihitung setiap bulan.⁵

b. *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* secara praktis adalah kerja sama atau perkongsian atas usaha dua orang atau lebih di mana satu pihak (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana *full* atau 100%, sedangkan pihak lain (*mudharib*) dengan *skill* dan profesionalnya akan mengelola dana tersebut dan keuntungan dari hasil tersebut akan dibagi sama rata sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad.⁶

Dalam akad *mudharabah* sendiri diartikan sebagai akad kerja sama dua pihak atau lebih, peran satu pihak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) atau dapat disebut dengan investor 100% sedangkan pihak lain berperan sebagai pihak dengan *skill* dan profesional yang mumpuni dalam dunia bisnis (*mudharib*). Saat terdapat keuntungan dari hasil kerja sama akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akadnya. Begitu pula saat tidak ada keuntungan yang dihasilkan, maka *shahibul maal* akan menanggung risiko finansial. Sedangkan untuk *mudharib* sendiri akan menanggung risiko bisnis, maksudnya yaitu pada saat usaha tidak mendapatkan keuntungan maka pihak *mudharib* tidak mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Peristiwa tersebut sering terjadi akibat dari siklus ekonomi maupun siklus bisnis pada saat melakukan investasi. Tetapi

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 75.

⁶ M. Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 73.

jika *mudharib* secara sengaja membuat gagal dan rugi atas usaha tersebut, maka semua risiko maupun kerugian akan ditanggung oleh pihak *mudharib*. Saat terjadi hal tersebut nanti berakibat pada tidak dapat dibayarnya simpanan pokok beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo dan mengakibatkan *mudharib* berhutang kepada pihak *shahibul maal*.⁷

Secara umum terdapat dua jenis *mudharabah* yang sering kita ketahui, antara lain:⁸

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Merupakan akad kerja sama yang dilakukan secara lebih luas cakupannya antara satu pihak (*shahibul maal*) dengan pihak lainnya (*mudharib*) disebut dengan *mudharabah mutlaqah*. Maksud dari cakupan lebih luas berpacu pada tidak adanya batasan mengenai waktu, spesifikasi usaha maupun daerah untuk berbisnis. Dalam kata lain pihak *shahibul maal* tidak membatasi *mudharib* selaku bank syariah dalam mengelola investasi dari dana yang sudah diberikan, sehingga *mudharib* memiliki hak penuh atas dana yang digunakan untuk berinvestasi ke berbagai sektor yang memiliki potensi dapat memberikan keuntungan. Pada *mudharabah mutlaqah* pembagian bagi hasil dapat menggunakan dua metode, antara lain:

a) *Anniversary Date*

Pembagian bagi hasil dalam metode ini akan dilakukan sesuai awal pembukaan deposito disetiap bulannya. Dalam artian bagi hasil nantinya akan diberikan pada bulan terakhir disetiap bank tutup buku dan nasabah diberi pilihan mengakumulasikan bagi hasil di rekening sendiri atau rekening lain yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

b) *End of Month*

Berbeda dengan *anniversary date* pembagian bagi hasil menggunakan metode ini dilakukan pada saat akhir bulan tepat pada tanggal tutup buku disetiap bulannya. Dalam metode ini perhitungan bagi hasil dapat dilakukan pada awal bulan atau akhir bulan dengan ketentuan bahwa pada awal bulan pada hari

⁷ M. Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 74.

⁸ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 190.

efektif akan dihitung menjadi tanggal tutup buku bukan tanggal pembukaan deposito. Tetapi pada perhitungan akhir bulan pada hari efektif akan dihitung menjadi tanggal tutup buku bulan terakhir bukan tanggal jatuh tepo deposito. Pada saat pembagian bagi hasil nasabah dapat memindahkan bagi hasil kedalam rekening lain yang sudah dikehendaki nasabah.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah memiliki istilah lain yaitu *specified mudharabah* atau *restricted mudharabah* yang pada dasarnya kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, dimana *mudharib* akan dibatasi dalam mengelola dana dari *shahibul maal*. Dalam kata lain *shahibul maal* memberikan batasan atau persyaratan kepada *mudharib* atas pengelolaan dana yang sudah diberikan kepada *mudharib*. Jadi nantinya pihak *mudharib* tidak akan secara leluasa dalam menginvestasikan dana dari *shahibul maal* ke berbagai sektor yang dirasa dapat memberikan keuntungan. Dalam *mudharabah muqayyadah* nantinya saat pembagian bagi hasil bank akan memberikan 2 (dua) pilihan nasabah menggunakan metode apa. 2 (dua) metode itu adalah:⁹

- a) *Cluster Pool Of Fund*: pada dasarnya metode ini digunakan untuk pendanaan proyek industri, yang pembagian bagi hasilnya dilakukan pada saat 1 (satu) bulan sekali, 3 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali. Selain tiga jangka waktu tersebut, dapat juga dilakukan dalam waktu lain yang sudah disepakati pada awal akad.
- b) *Specific Project*: metode ini digunakan pada saat pendanaan suatu proyek tertentu. Sehingga pembagian bagi hasil menggunakan metode ini nantinya akan berdasarkan arus kas dari proyek yang telah diberikan dana untuk pembangunannya. Jadi, bank membuat ketentuan dalam hal pencairan deposito dengan pembagian bagi hasil menggunakan metode ini, antara lain:¹⁰

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 281.

¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 283.

- (1) Khusus untuk proyek *cluster* deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan syarat deposan menghendaki hal tersebut. Tetapi bank akan mengenakan denda (*penalty*) yang disebabkan tidak terpenuhinya jangka waktu akad yang sudah disepakati di awal, sesuai dengan klausa denda (*penalty*) yang tertera pada surat perjanjian atau akad yang telah disepakati di awal.
- (2) Untuk *specific project* dikhususkan ketentuannya oleh bank dalam hal pencairan depositonya. Maksudnya, dalam mencairkan deposito tidak dapat dilakukan sebelum deposito itu jatuh tempo dan jika ingin dicairkan sebelum jatuh tempo, maka terlebih dahulu membutuhkan izin dari bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua keputusan ada pada pihak bank. Jadi, saat bank menolak permohonan karena dirasa dari pencairan deposito itu memberatkan pihak bank maka deposito tidak bisa dicairkan. Tetapi saat bank merasa pencairan deposito yang diajukan tidak memberatkan pihak bank, maka permohonan itu akan disetujui. Persetujuan pencairan itu akan dibarengi oleh pemberian denda kepada deposan sesuai kesepakatan di awal.

Deposito yang menggunakan sistem syariah disebut dengan deposito syariah. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bank yang menjalankan produk deposito akan melakukan kegiatan usahanya dengan dasar hukum syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah menetapkan fatwa bahwa deposito yang baik dan diakui benar adalah deposito yang menggunakan akad *mudharabah* sebagai pengikatnya.¹¹

Dalam pengertian lain deposito adalah sebuah investasi yang melalui perantara berupa dana pihak ketiga yang disertai dengan ketentuan jangka waktu dalam penarikan dananya. Jatuh tempo sebagai waktu yang digunakan dalam masa pengambilan dananya akan disertai dengan pendapatan berupa imbalan bagi hasil. Sedangkan pengertian deposito berdasarkan undang-undang ialah investasi disertai dengan

¹¹ Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), 73.

akad *mudharabah* maupun akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana dalam pengambilan dana yang sudah disimpan di bank sesuai dengan pemilihan jangka waktu di awal akad. Pernyataan ini tertera pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

2. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Secara terminologi bagi hasil disebut dengan *profit sharing* di mana arti dari *profit sharing* di kamus ekonomi berarti pembagian keuntungan atau distribusi dari bagian keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pegawainya baik berbentuk bonus mingguan atau bulanan bahkan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan menurut pakar perbankan syariah seperti Antonio bagi hasil merupakan sistem pengelolaan dana yang didasarkan pada syariah Islam. Atau dapat kita sebut sebagai distribusi bagi hasil atas hasil yang diperoleh atau berasal dari usaha yang dilakukan oleh shahibul maal dengan mudharib. Dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh Veithzal Revai dan Arviyan Arifin dalam buku yang berjudul *Islamic Banking*, bagi hasil yaitu sebuah bentuk perolehan atas kegiatan usaha yang berasal dari perjanjian investasi. Di mana waktunya tidak menentu, tidak tetap maupun tidak pasti dalam bank syariah. Selain itu besarnya perolehan tergantung pada hasil atas kegiatan usaha yang benar-benar didapatkan oleh bank syariah.¹²

Pengoperasian usaha atau perusahaan akan dilakukan bersama sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati antara satu pihak dengan pihak lain disebut dengan sistem bagi hasil. Tidak lupa dalam perjanjian tersebut akan dirincikan mengenai pembagian yang didapat atas hasil dari jalannya usaha baik beranggotakan dua pihak maupun lebih. Dapat dikatakan bahwa salah satu ciri khas sebuah bank syariah terletak pada bagi hasil. Untuk nasabah, ketentuan besarnya nilai bagi hasil harus dirincikan pada awal disepakatinya akad. Tidak lupa, dalam pembagian tersebut harus sama-sama ikhlas dan tidak dalam keadaan yang memaksa salah satu pihak untuk menyetujui perjanjian tersebut.

¹² Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 469.

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Tinggi rendahnya bagi hasil yang ada di bank syariah tentu dapat terpengaruh dari beberapa faktor. Sering ditemui yang dapat mempengaruhi bagi hasil adalah faktor langsung dan faktor tidak langsung. Penjelasannya sebagai berikut:

1) Faktor Langsung

Faktor langsung sering disebut dengan *direct factors* merupakan penentu tinggi rendahnya bagi hasil yang ada di bank syariah. Pada faktor ini sering kali dijumpai ada pada kebijakan bank itu sendiri. Terdapat beberapa faktor langsung yang dapat mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

a) *Investment Rate*

Rasio investasi merupakan persentase seberapa besar dana yang harus dikeluarkan oleh bank syariah untuk diinvestasikan kembali di mana nominal itu diambil dari keseluruhan dana yang dimiliki oleh bank syariah. Ketentuan itu dilaksanakan berdasarkan kebijakan Bank Indonesia yang mengatakan, dana yang dihimpun oleh bank syariah untuk menjaga likuiditas bank tidak boleh diinvestasikan, melainkan dimasukkan ke dalam giro wajib minimum. Sebagai contoh misalnya, jika rasio investasi suatu bank syariah adalah 83%, maka 17% yang merupakan sisa keseluruhan dana harus dialokasikan untuk pemenuhan likuiditas bank syariah tersebut.

b) Total Dana Yang Ada Untuk Investasi

Maksudnya disini ialah total dana dari berbagai sumber yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk diinvestasikan kembali ke lembaga keuangan syariah, di mana dalam menghitung dana yang harus diinvestasikan dapat dihitung dengan pemilihan metode satu dari dua yakni *average* (rata-rata) dari minimum keseluruhan dana bulanan atau memilih metode *average* (rata-rata) akhir dari keseluruhan harian.¹³

c) Jenis Dana

Jenis dana menjadi salah satu faktor langsung dari tinggi rendahnya bagi hasil dikarenakan, bank syariah dalam mencari nasabah tentunya akan menawarkan berbagai produk yang berbeda dengan

¹³ Zulkifli Rusby, *EKONOMI ISLAM* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 172.

bank lainnya. Jenis dana yang dapat ditawarkan seperti tabungan *mudharabah* atau sertifikat investasi antar bank syariah dengan akad *mudharabah* (SIMA). Oleh karena itu, berbeda jenis dana yang ditawarkan akan berbeda pula tingkat bagi hasil yang dihasilkan.¹⁴

d) Nisbah (*Profit Sharing Ratio*)

Nisbah atau *profit sharing ratio* adalah persentase tertentu yang sudah tertera didalam akad kerjasama usaha baik dalam akad *mudharabah* maupun *musyarakah* yang sudah disepakati antara bank dengan nasabah sebagai investor. Dilihat dari beberapa segi nisbah (*profit sharing ratio*) memiliki karakteristik yang berbeda yaitu:¹⁵

- (1) Ciri khas yang dimiliki *mudharabah* yaitu ketentuan dan kesepakatan atas nisbah sudah disepakati kedua belah pihak pada saat awal kontrak atau perjanjian.
- (2) Nominal berapa persen nisbah yang ditawarkan oleh bank berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dari pihak bank sendiri.
- (3) Jumlah nisbah dari masing-masing bank berbeda dari satu waktu ke waktu selanjutnya, sebagai contoh deposito jangka waktu 1 bulan dengan 3 bulan akan berbeda tingkat bagi hasilnya sesuai ketentuan bank dan dapat berubah saat dirasa perlu dirubah.
- (4) Persentase bagi hasil dapat bervariasi dari satu rekening ke rekening lainnya tergantung dari jumlah dana dan waktu jatuh temponya.
- (5) Tingkat bagi hasil yang ditawarkan akan berbeda dari satu jenis dana yang dihimpun dengan jenis dana lainnya. Sebagai contoh, tingkat bagi hasil dalam tabungan *mudharabah* akan berbeda dengan deposito *mudharabah*. Hal ini yang dimaksud dengan tergantung pada jenis penghimpunan dana yang dipilih.

e) Kebijakan Akuntansi

¹⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019),472.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik: Islamic banking = al-masraf Islam*, Cet. 15, Kajian ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2001), 140.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi bagi hasil adalah kebijakan akuntansi. Di dalam kebijakan akuntansi terdapat beberapa hal yang dapat menaik turunkan bagi hasil, salah satunya ialah penyusutan. Dari penyusutan tersebut akan mempengaruhi kauntungan atau laba usaha bank tersebut. Tetapi dalam penyusutan dapat tidak mempengaruhi bagi hasil asal bank menggunakan *revenue sharing* dalam metode pembagian bagi hasilnya, tetapi jika bank lebih memilih memakai metode *profit sharing*, maka secara langsung penyusutan akan berpengaruh terhadap bagi hasil.¹⁶

2) Faktor Tidak Langsung¹⁷

a) Ketentuan atas pendapatan yang disertai dengan biaya *mudharabah*. Atas ketentuan tersebut terdapat butir-butir yang harus disepakati antara bank dengan nasabah. Ketentuan tersebut antara lain:

(1) Untuk urusan pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya, bank dan nasabah akan membagi sama rata akan hasil tersebut.

(2) Saat kebalikan dari poin 1, yaitu bank yang menanggung semua biayanya maka dapat dikatakan adanya penggunaan metode *revenue sharing*.

b) Ketentuan manajemen bank (Prinsip dan Metode Akunting)

Secara tidak langsung ketentuan yang diatur oleh bank syariah akan mempengaruhi tinggi rendahnya bagi hasil tersebut. Ketentuan tersebut dapat berkaitan dengan kegiatan yang ada hubungannya dengan pendapatan dan biaya.

c. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Dalam perhitungan bagi hasil bank dapat memberikan dua tawaran kepada nasabah dalam memilih metodenya. Dua metode tersebut ialah:¹⁸

1) Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

¹⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 474.

¹⁷ Zulkifli Rusby, *EKONOMI ISLAM* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 173.

¹⁸ H. Zaenal Arifin, *AKAD MUDHARABAH (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Jakarta: CV. Adanu Abimata, 2021), 14-16.

Revenue sharing atau dalam bahasa Indonesia berarti bagi hasil. Secara sederhananya dalam metode ini pembagian keuntungan menggunakan bagi hasil bruto. Definisi bagi hasil bruto ialah pembagian atas bagi hasil yang didasarkan kepada penghasilan keseluruhan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan usaha.

Pada metode *revenue sharing* ini nantinya bagi hasil yang diberikan kepada *shahibul maal* akan lebih besar dari pada suku bunga yang ada di pasar. Hal ini karena bagi hasil dengan sistem *revenue sharing* berdasarkan total keseluruhan pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya untuk bank.

2) Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Dalam bahasa Indonesia *profit sharing* berarti pembagian keuntungan dan kerugian (bagi untung). Maksudnya adalah apabila mendapatkan keuntungan dari hasil usaha akan dibagi kepada dua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati awal akad. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri juga sama, nantinya akan dibagi sama rata sesuai porsi masing-masing. Perhitungan dalam metode ini yaitu dengan mengurangi jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan biaya guna mengelola dana.

Jika dijabarkan, artian kerugian dan keuntungan dalam model ini adalah rugi bagi *shahibul maal* berarti tidak mendapat keuntungan dari semua dana yang telah diinvestasikan pada usaha tertentu, sedangkan kerugian bagi *mudharib* adalah tidak mendapatkan gaji atau upah atas apa yang sudah dikerjakan dalam menjalankan usahanya. Untuk untung sendiri berarti adanya pembagian sejumlah dana setelah dikurangi biaya-biaya untuk kebutuhan usaha yang dijalankan. Terdapat 3 (tiga) arti dalam keuntungan usaha, yang pertama bernilai negatif yang berarti pengoperasian usaha merugi, yang kedua bernilai positif saat ada sisa dari pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya dan yang terakhir bernilai 0 (nol) yang berarti tidak ada sisa pendapatan setelah dikurangi biaya atau nilai pendapatan sama dengan nilai biaya.

3. BI Rate

a. Suku Bunga

Bunga bank sering ditemui di produk bank konvensional, yang memiliki arti sebuah balas budi atas

bantuan dari bank kepada nasabahnya. Pengertian lain dari bunga bank yaitu keharusan pembayaran sejumlah nominal kepada pihak nasabah karena sudah menyimpan dananya di bank dan nominal yang harus dibayarkan oleh nasabah saat melakukan pinjaman terhadap bank.¹⁹

Pengertian bunga banyak disampaikan oleh beberapa ahli ekonomi, salah satunya yaitu Hubbard, beliau berpendapat bahwa bunga ialah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam saat melakukan pinjaman dan sejumlah biaya sebagai imbalan atas investasi yang dilakukan oleh penyeter. Menurut Miskhin suku bunga berarti biaya atas penyewaan dana yang harus dibayar. Sedangkan menurut Kern dan Guttman suku bunga adalah harga yang dipengaruhi oleh harga lainnya di mana pengaruhnya bermula dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar.²⁰

b. Jenis Suku Bunga

Jenis suku bunga dapat dibedakan berdasarkan metode pembebanannya. Metode tersebut antara lain:

1) *Flat Rate* (Bunga Merata)

Jenis perhitungan suku bunga di mana dalam masa pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh nasabah selalu sama disetiap angsurannya. Jadi, nantinya sampai pinjaman lunas nasabah akan membayar sejumlah nominal yang sampai dari awal sampai akhir. Dalam mencari nominal suku bunga pada jenis perhitungan suku bunga ini, menggunakan persentase bunga pada tiap periode pembayaran dikalikan dengan jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.²¹

2) *Sliding Rate* (Bunga Menurun)

Bunga yang dibebankan kepada nasabah pada perhitungan ini adalah, bunga yang dihitung berdasarkan sisa pembayaran pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah. Jadi, nantinya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah akan turun sesuai dengan berkurangnya jumlah pinjaman, tetapi pembayaran pokok pinjaman akan sama sampai akhir. Di mana nasabah dalam membayar angsuran

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 - Perbankan Seri Literasi Keuangan* (Jakarta: OJK, 2019), 38.

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 92.

akan turun disetiap bulannya karena bunga yang harus dibayarkan turun juga. Jenis bunga ini biasanya diberikan oleh bank kepada para pelaku usaha atau pada sektor yang produktif, yang nantinya dalam pembayaran angsuran pinjaman nasabah tersebut tidak merasa terbebani.²²

3) *Annuity Rate* (Bunga Anuitas)

Jenis bunga ini termasuk pada jenis bunga yang efektif. Disebut demikian karena bunga yang harus dibayar oleh nasabah dihitung secara sistematis, sehingga pembayaran angsuran setiap bulan akan selalu sama dengan tambahan bunga yang dibebankan dihitung dari sisa pinjamannya. Dapat ditemui jenis bunga ini pada kredit kepemilikan rumah yang diberikan oleh bank.²³

4) *Floating Rate* (Bunga Mengambang)

Bunga yang akan dibebankan kepada nasabah pada jenis perhitungan ini akan sesuai dengan besarnya bunga di pasar uang. Jadi, nasabah dalam membayar angsuran terutamanya pada jumlah pembebanan bunga di setiap bulan akan bergantung pada besarnya suku bunga di pasar uang pada bulan tersebut. Yang menjadi masalah adalah, jika besarnya suku bunga di pasar uang tinggi maka nasabah harus membayar tinggi, tetapi jika di pasar uang tingkat suku bunga rendah maka nasabah akan membayar rendah bunga angsurannya. Oleh karena itu, masalah tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulannya.²⁴

c. *BI Rate*

Menurut ITF yang digunakan sebagai penyajian kebijakan akan mengontrol inflasi, *BI Rate* ialah sebuah suku bunga acuan di mana tingkat tingginya ditentukan oleh Bank Indonesia. Adanya penentuan suku bunga tersebut didasarkan pada inflasi yang terjadi di negara tersebut, dan digunakan sebagai kebijakan moneter di Indonesia. Arti lain dari *BI Rate* adalah sebuah upaya yang dilakukan bank sentral yaitu Bank Indonesia dalam mengupayakan penurunan inflasi yang terjadi

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

²³ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 - Perbankan Seri Literasi Keuangan* (Jakarta: OJK, 2019), 46.

²⁴ Adi Martono dan Mohamad Safii, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Banten: UNPAM PRESS, 2022), 128.

di Indonesia dengan melakukan kebijakan moneter. Kebijakan ini dengan menaikkan suku bunga acuan dan informasi mengenai perubahan tingkat *BI Rate* tersebut akan diumumkan secara luas dalam rapat bulanan Dewan Gubernur oleh Gubernur dari Bank Indonesia itu sendiri.²⁵

Penetapan akan tingkat *BI Rate* oleh bank sentral berguna untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mencapai inflasi. Namun, untuk mencapai target inflasi membutuhkan waktu (*time lag*) karena proses dari penetapan *BI Rate* hingga tercapainya target tersebut sangat kompleks. *BI Rate* juga berguna bagi bank syariah untuk membandingkan tingkat suku bunga pinjaman bank konvensional dengan tingkat bagi hasil bank syariah. Saat *BI Rate* meningkat, produk pembiayaan dari bank syariah akan lebih kompetitif dari pada produk pinjaman dari bank konvensional.

Suku bunga acuan ini sudah dipakai dari tahun 2005 sebagai penentuan kebijakan moneter. Lalu terdapat pembaharuan pada tahun 2016 tanggal 19 Agustus yaitu lahirnya suku bunga acuan baru yang dikenal dengan sebutan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (*BI-7DRR*). Adanya acuan baru untuk tingkat suku bunga dalam menggantikan yang lama diharapkan dapat mendorong pasar keuangan yang lebih baik terutama bagi pengguna instrumen *Repo*. Pada acuan suku bunga yang baru, dapat dikatakan mempunyai kaitan yang lebih erat lagi dengan suku bunga yang ada di pasar uang. Selain itu untuk jenis acuan yang baru dapat secara bebas diperjualbelikan. Bank Indonesia dalam mengganti acuan yang baru pada suku bunga mengharapkan dampak yang bagus. Dampak tersebut ialah:

- 1) Kuatnya kebijakan moneter atas pembaharuan suku bunga acuan baru (*BI-7DRR*) dalam pasar uang.
- 2) Tingginya tingkat penyebaran kebijakan moneter, yang berasal dari pergeseran perputaran uang maupun naik atau turunnya bunga yang ada di perbankan.
- 3) Terwujudnya pasar ekonomi yang lebih luas terutama dalam jangka waktu 3-12 bulan dengan kuatnya pengaturan atas suku bunga dan transaksi uang antar bank (*PUAB*).

²⁵ Bank Indonesia, “*BI RATE*,” diakses 7 Februari 2024, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-rate/default.aspx>.

Bank Indonesia mengubah nama BI-7DRR menjadi *BI Rate* pada tanggal 21 Desember 2023 untuk meningkatkan komunikasi kebijakan moneter.²⁶

d. Fungsi *BI Rate*

Terdapat 2 (dua) fungsi *BI Rate* dalam perekonomian di Indonesia, antara lain:²⁷

1) Sebagai Pengontrol Laju Inflasi

Adanya keterkaitan yang kuat diantara *BI Rate* dengan inflasi. Keterkaitan tersebut adalah saat terjadi inflasi *BI Rate* akan ditetapkan sebagai kebijakan dalam pengendalian laju inflasi. Pencetakan uang kembali akan membuat jumlah beredarnya uang di masyarakat melimpah banyak dan harga barang konsumsi meningkat membuat pemerintah melakukan penetapan suku bunga acuan supaya inflasi yang terjadi menjadi lebih terkontrol. Bank Indonesia dalam menekan laju inflasi menggunakan cara menaikkan *BI Rate* saat inflasi semakin tinggi dan menekan uang yang beredar di masyarakat. Ketika cara ini berhasil menurunkan laju inflasi, maka bank sentral akan menetapkan tingkat *BI Rate* seperti semula.

2) Sebagai Penjaga Kestabilan Ekonomi

Acuan bunga oleh bank sentral dikenal sebagai pengaruh suku bunga yang ada di perbankan. Kenaikan tingkat *BI Rate* akan membuat suku bunga bank (pinjaman maupun deposito) juga ikut naik. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat *BI Rate* menurun hal ini juga akan menurunkan suku bunga bank. Kebijakan tersebut dilakukan agar suku bunga yang ada di perbankan sama rata dengan didasarkan pada keadaan perekonomian Indonesia saat ini.

4. Inflasi

a. Konsep Dasar Inflasi

Pengertian inflasi dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya yaitu Nanga yang berpendapat mengenai inflasi ialah sebuah gejala yang awal mulanya ditandai dengan lonjakan harga barang yang drastis secara umum dan terus-menerus dari waktu ke waktu. Beliau berpendapat bahwa naiknya harga terjadi hanya satu kali tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Sedangkan menurut Manurung dan Rahardja

²⁶ Bank Indonesia.

²⁷ M. Rizaldy Insan Baihaqqy, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2022), 115-116.

inflasi ialah harga yang cenderung naik secara terus-menerus dan umum. Harga yang naik berasal dari satu jenis barang tidak berarti inflasi, tetapi jika harga barang disemua tempat mengalami kenaikan baru dapat disebut dengan inflasi. Selain itu, menurut Eachern inflasi berarti harga rata-rata barang yang dijual mengalami kenaikan secara terus-menerus.²⁸

Setiap harga barang naik pada bulan ini tetapi pada bulan selanjutnya mengalami penurunan akibat biaya produksi belum bisa disebut dengan inflasi. Menurut Sukirno inflasi ialah kejadian naiknya harga dalam suatu perekonomian di suatu negara. Selanjutnya inflasi menurut BPS berarti sebuah indikator yang digunakan untuk melihat apakah ekonomi pada daerah atau wilayah mengalami kenaikan barang dan jasa atau tidak, di mana untuk mengetahuinya pemerintah akan mengukur menggunakan indeks harga konsumen. Hal ini berarti dari adanya inflasi akan mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan dan pada sisi lain akan mempengaruhi besarnya biaya untuk produksi barang.

b. Indikator Inflasi

Menurut Nopirin, terdapat tiga macam indeks yang dapat digunakan dalam menghitung tingkat harga yang naik dalam hal ini inflasi. Tiga indeks ini sebagai berikut:²⁹

1) Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)

Pada pengukuran inflasi menggunakan indeks ini lebih ditekankan kepada biaya atas pembelian barang konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mencukupi kebutuhannya. Di Indonesia sendiri dikenal 9 macam barang pokok yang masing-masing orang berbeda pendapat akan arti penting dari barang tersebut. Oleh karena itu pada perhitungan menggunakan indeks ini akan diberikan nominal tertentu sebagai penimbangnya. Nominal ini berasal dari persentase akan pengeluaran terhadap barang tertentu yang dihitung dari keseluruhan pengeluaran tersebut.

2) Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

²⁸ H. Abdul Wahab, *Ekonomi Makro: Pengantar* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 122.

²⁹ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2000), 174.

Pada perhitungan indeks ini, lebih mengacu kepada perdagangan barang pada sektor yang besar. Sehingga semua komponen yang termasuk dalam perdagangan besar seperti harga untuk barang mentah, harga untuk bahan setengah jadi dan harga untuk barang jadi akan masuk pada perhitungan indeks ini. Perlu digaris bawahi bahwa perubahan indeks harga dalam perdagangan besar akan sama nilainya dengan indeks yang digunakan untuk mengukur biaya kebutuhan sehari-hari.

3) GNP Deflator (Indeks Harga Implisit)

Berbeda dengan kedua perhitungan di atas, pada perhitungan menggunakan indeks harga implisit jumlah barang dan jasa yang masuk akan lebih banyak ketimbang dua indeks sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa cakupan barang dan jasa pada perhitungan indeks ini sangat banyak jumlahnya. Untuk mencari tahu nilai dari GNP diperlukan perhitungan dengan membagi harga dasar barang yang berlaku (GNP nominal) dengan harga dasar barang konstan (GNP riil).

Menurut H. Abdul Wahab terdapat 6 pengukuran inflasi yang dilakukan dengan pengukuran indeks harga di pasaran. 6 indeks harga tersebut yaitu:³⁰

- 1) Pengukuran yang dilakukan atas biaya pengeluaran untuk biaya hidup (*Cost of Living Index*).
- 2) Indeks Harga Konsumen, diukur berdasarkan harga rata-rata dari jenis barang tertentu yang dibeli oleh masyarakat (*Consumer Price Index*).
- 3) Indeks Harga Produsen, pengukuran harga atas barang-barang yang diperlukan oleh produsen dalam pembuatan suatu barang (produksi). Perhitungan ini sering dipakai dalam hal mencari indeks harga konsumen untuk waktu mendatang, karena saat harga barang baku meningkat biaya untuk produksi juga mengalami peningkatan. Hal ini nantinya akan berakibat pada harga barang konsumsi akan mengalami peningkatan.
- 4) Pengukuran atas harga dari sebuah komoditas tertentu disebut dengan indeks harga komoditas.
- 5) Indeks untuk pengukuran harga barang yang digunakan untuk modal usaha.

³⁰ H. Abdul Wahab, *Ekonomi Makro: Pengantar* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 126.

- 6) *Deflator PDB* yang digunakan dalam mencari nilai akan perubahan harga atas hasil barang baru, barang hasil produksi lokal, barang yang sudah jadi dan jasa.

c. Penyebab Terjadinya Inflasi

Taqiuddin Ahmad bin Al Maqrizi yang merupakan salah satu ekonom Islam berpendapat bahwa terdapat dua hal yang dapat menjadi penyebab adanya inflasi di sebuah negara, yaitu berasal dari alam dan dari manusia. Penjelarasannya sebagai berikut:³¹

1) *Natural Inflation*

Pada jenis penyebab ini inflasi dipengaruhi oleh faktor alam yang tidak menentu dan tidak bisa dicegah oleh manusia. Menurunnya penawaran dan naiknya permintaan di pasar membuat inflasi alam akan terjadi. Terjadinya inflasi ini juga dapat berupa dari masuknya uang hasil ekspor yang melebihi batas, tetapi untuk uang yang keluar dari hasil import menurun. Karena hal itu nantinya nilai untuk ekspor bersih akan tinggi yang menyebabkan tingginya permintaan agregat. Selain alasan di atas, kondisi negara yang sedang mengalami perang, embargo, kelaparan yang merajalela serta boikot produk hasil negara tersebut membuat harga di pasar mengalami kenaikan yang parah atau disebut inflasi.

2) *Human Error Inflation*

Pada jenis inflasi ini penyebab utamanya adalah manusia itu sendiri. Sering kali inflasi ini disebut dengan *false inflation*. Sebab adanya inflasi ini yaitu:³²

- a) Pejabat melakukan korupsi disertai dengan penyalahgunaan jabatan (*corruption and bad administration*), inflasi dapat terjadi karena ulah para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk hal yang pribadi. Ketika para pejabat tinggi ingin hasil yang lebih akan membuat pejabat tersebut melakukan pencurian uang baik digunakan untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga maupun demi gengsi semata. Hal ini menyebabkan turunya penerimaan dan pendapatan

³¹ Mahyarni dan Astuti Meflinda, *Ekonomi Makro Terintegrasi* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), 31-33.

³² Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 131.

negara secara drastis. Keadaan ini lah yang membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk.

- b) Penarikan akan pajak yang berlebihan (*excessive tax*), pejabat yang melakukan korupsi menyebabkan pengeluaran negara menjadi meningkat drastis, hal ini membuat mereka melakukan kompensasi dengan cara menetapkan tingkat pajak yang tinggi disertai dengan berbagai jenis pajak yang tidak masuk akal. Hal ini tentunya berefek pada pajak yang harus dibayar semakin tinggi dan akhirnya biaya untuk bahan baku produksi juga semakin tinggi.
- c) Pencetakan Uang Berlebihan (*excessive seignorage*), saat pemerintah mengalami defisit anggaran maka jalan untuk mengatasinya dengan mencetak uang kembali untuk membayar anggaran tersebut. Hal ini akan berakibat pada uang yang beredar di masyarakat jumlahnya semakin banyak. Oleh karena itu harga barang naik disertai dengan nilai dari uang sudah tidak ada artinya lagi. Adanya defisit anggaran karena banyak pejabat yang korupsi maupun perekonomian saat itu mengalami kemacetan.

d. Teori Inflasi

Para ahli tentunya memiliki pandangan lain mengenai inflasi dan penyebabnya maupun akibatnya. Terdapat tiga teori yang sering ditemui jika membahas inflasi. Tiga teori tersebut ialah:

1) Teori Kuantitas

Secara singkat teori kuantitas berarti kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya kuantitas uang. Menurut teori ini, terjadinya inflasi dapat terjadi disebabkan oleh dua hal. Dua hal tersebut ialah:³³

- a) Beredarnya uang di masyarakat melebihi kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Apabila uang dalam bentuk kartal maupun giral beredar secara berlebihan di masyarakat, tentunya hal ini membuat inflasi pada suatu negara akan menjadi nyata. Selain itu, adanya pencetakan uang kembali yang dilakukan oleh pemerintah atas upaya pemecahan masalah dari anggaran pemerintah yang defisit. Hal ini

³³ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro: Teori, Soal, dan Penyelesaiannya* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), 164-165.

tentunya akan memperparah tingkat inflasi jika anggaran pemerintah yang defisit semakin besar maka pemerintah juga akan mencetak uang lagi untuk biaya defisit tersebut.

- b) Adanya harapan dari masyarakat yang menginginkan harga barang naik pada masa waktu mendatang.

Selain jumlah uang yang beredar di masyarakat, menurut teori kuantitas hal yang dapat mempengaruhi adanya inflasi adalah harapan yang muncul dari masyarakat akan naiknya harga untuk barang konsumsi pada masa mendatang. Hasil dari pemikiran tersebut pemerintah akan merespon dengan mencetak uang tambahan dan masyarakat akan membelanjakan uangnya dalam bentuk barang supaya terhindar dari kerugian memegang uang tunai. Dari kejadian tersebut maka uang yang digunakan untuk berbelanja akan melewati kapasitas tambahan uang dari mencetak kembali yang dilakukan oleh pemerintah. Jika hal ini tidak cepat diatasi oleh pemerintah maka akan terjadi hiperinflasi pada negara tersebut.

2) Teori Keynes

Teori selanjutnya yang membahas mengenai inflasi adalah teori yang berasal dari ahli ekonomi Keynes atau dikenal dengan sebutan teori Keynes. Menurut beliau inflasi dapat terjadi disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk hidup diluar kemampuannya ekonominya. Pada teori ini juga menjelaskan mengenai permintaan agregat yang melambung melebihi batas jumlah barang yang tersedia di pasar (*Inflationary Gap*).³⁴ Masyarakat yang berkeinginan hidup mewah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:³⁵

- a) Pemerintah

Sejalan dengan teori kuantitas, dalam teori Keynes pemerintah menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Dari pencetakan uang kembali oleh pemerintah karena sebagai solusi dari pembayaran anggaran yang defisit. Hal ini akan memperburuk

³⁴ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 2 EKONOMI MAKRO* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2001), 170.

³⁵ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro: Teori, Soal, dan Penyelesaiannya* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), 166-167.

kondisi inflasi yang terjadi pada negara tersebut. Selain itu, pemerintah yang melakukan korupsi guna memperoleh bagian yang lebih besar dengan cara menaikkan pajak dan mengambil hasil tersebut untuk dirinya sendiri. Pemerintah dalam menjalankan rencana tersebut akan menaikkan defisit anggaran yang tersedia dengan cara menaikkan pula pengeluaran pemerintah.

b) Pengusaha Swasta

Kelompok masyarakat yang menjadi penyebab adanya inflasi selanjutnya adalah pengusaha swasta. Para pengusaha akan berinvestasi secara besar-besaran terhadap investasi baru dengan cara memperoleh pinjaman dari bank dan bukan berasal dari dana sendiri.

c) Serikat Buruh

Kelompok terakhir yang dapat menyebabkan inflasi adalah serikat buruh. Berasal dari buruh yang menuntut kenaikan gaji melebihi batas kemampuan produktifnya akan berdampak pada terjadinya inflasi. Dari kenaikan gaji yang diupayakan oleh buruh kerja akan berimbas pada naiknya biaya produksi pada usaha tersebut, dan akhirnya akan menyebabkan harga barang naik secara drastis untuk waktu yang lama dan tidak berhenti atau terus menerus disebut dengan inflasi.

3) Teori Struktural

Teori terakhir yang menjelaskan mengenai inflasi adalah teori struktural. Teori yang mengacu pada sebab terjadinya inflasi untuk jangka waktu yang panjang. Keadaan struktur ekonomi yang kaku menjadi penyebab adanya inflasi pada suatu negara menurut teori ini. Dari sebab ekonomi tersebut akan mengakibatkan produksi barang melambat namun kebutuhan akan barang semakin meningkat, sehingga harga barang menjadi naik dan devisa menjadi langka. Inflasi yang terjadi dari sebab tersebut tidak dapat dihentikan dengan cara pengurangan atas beredarnya uang di masyarakat tetapi harus dihentikan dengan ketentuan pemerintah mengenai pembaharuan kebijakan pada sektor bahan konsumsi maupun ekspor.³⁶ Dalam teori struktural, terdapat dua hal yang dapat mempengaruhi perekonomian, antara lain:

³⁶ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 2 EKONOMI MAKRO* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2001), 170.

a) Inelastisitas Pendapatan Ekspor

Lambatnya nilai pertumbuhan akan ekspor dibandingkan dengan beberapa sektor perekonomian membuat pendapatan ekspor tidak elastis. Penyebab dari lambatannya nilai pertumbuhan ekspor, antara lain:

- (1) Memburuknya harga barang hasil ekspor dari negara-negara berkembang di pasar dunia.
- (2) Ketidakpekaan produksi barang ekspor terhadap kenaikan harga.

b) Ketidakelastisan Pasokan Pangan Dalam Negeri atau Produksi Lokal

e. Jenis – Jenis Inflasi

Inflasi yang terjadi dapat digolongkan menjadi beberapa macam jenis. Antara lain:

1) Inflasi Berdasarkan Sifatnya³⁷

a) Inflasi Ringan (*Low Inflation*)

Inflasi yang terjadi pada sebuah negara masih pada tingkat kurang dari 10% atau masih tahap di bawah 10%. Pada masa ini masyarakat masih berkeinginan untuk memegang uang dan percaya penuh akan uang. Penyebab lain akan inflasi ini adalah inflasi satu digit (*single digit inflation*) dan menjadi inflasi yang normal terjadi dalam sebuah negara.

b) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)

Inflasi yang terjadi pada sebuah negara sudah memasuki rasio antara 20%-200% dalam satu tahun. Penyebab adanya inflasi ini yaitu lemahnya kebijakan pemerintah, adanya peperangan di negara tersebut dan hal lain yang menjadi penyebab barang dalam negara tersebut tidak tersedia tetapi beredarnya uang di masyarakat jumlahnya sangat berlimpah, dari sebab itu masyarakat pada akhirnya tidak mempercayai uang lagi. Yang pada akhirnya uang hanya sebagai pegangan dan masyarakat akan menyimpan uangnya dalam bentuk aset riil. Dari hal tersebut pasar uang akan mengalami penurunan dan pinjaman yang dilakukan bank akan diubah dengan cara lain yang mampu menarik masyarakat yaitu dengan cara menaikkan bunga bank.

³⁷ Aqwa Naser Daulay, M. Syahbudi, dan Fauzi Arif Lubis, *Ekonomi Makro Islam* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019), 137.

Inflasi ini juga sering disebut dengan inflasi double bahkan triple digit.

c) Inflasi Tinggi atau Tidak Terkendali (*Hyperinflation*)

Tingkat inflasi yang terjadi pada sebuah negara sudah memasuki rasio di atas 200% dalam satu tahun. Menyebabkan tidak percayanya masyarakat akan uang dan lebih memilih menukarkan uangnya dengan emas, tanah atau bangunan yang dianggap setara dengan harga saat terjadinya inflasi ini.

Adanya jenis inflasi ini disebabkan oleh beberapa hal:

(1) Kehidupan sosial yang hancur karena tidak adanya aktifitas ekonomi di negara tersebut.

(2) Pemerintah yang tidak mampu membuat kebijakan dalam upaya peredaman tingkat inflasi dan hilangnya kepercayaan masyarakat akan kekuasaan pemerintah.

(3) Perang yang terjadi di negara tersebut dan aksi boikot negara lawan terhadap mata uang negara yang dijajah. Contohnya saat perang antara Irak dan Amerika di mana terdapat aksi boikot oleh Amerika dan sekutunya terhadap mata uang Irak.

2) Inflasi Menurut Sebab Terjadinya³⁸

a) *Demand Pull Inflation*

Arti lain dari *demand pull inflation* ialah, sebuah kejadian adanya inflasi yang menjadi penyebabnya adalah permintaan yang melebihi kapasitas (permintaan yang berlebihan). Dari permintaan yang terus meningkat akan konsumsi barang dan jasa membuat pemerintah dan pengusaha berupaya memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut dengan cara meminjam uang di bank (kredit) untuk investasinya. Jika permintaan akan barang konsumsi naik secara drastis, tetapi keseluruhan akan faktor produksi sudah digunakan secara penuh, akan menyebabkan naiknya harga barang untuk konsumsi. Akibatnya akan terjadi inflasi di mana bukan mendatangkan lowongan pekerjaan tetapi malah menimbulkan pemecatan karyawan perusahaan dan menyebabkan pengangguran semakin banyak.

³⁸ Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Makassar: Gaung Persada, 2008), 63-65.

b) *Cost Push Inflation*

Cosh push inflation sering disebut dengan inflasi atas naiknya biaya untuk produksi. Dari harga barang produksi yang naik disertai dengan pengurangan jumlah karyawan dan belum lagi banyak demo untuk kenaikan gaji menyebabkan terjadinya inflasi. Pemaksaan akan naiknya gaji yang diutarakan para buruh tidak sejalan dengan keaslian di lapangan. Hal ini berpusat pada buruh yang tidak bekerja atau sudah bekerja tetapi tidak memiliki *skill* yang dibutuhkan perusahaan, sehingga karyawan yang memiliki *skill* pada bidangnya akan menawarkan harga tinggi untuk *skill* yang dimilikinya. Dari biaya produksi dan gaji yang melambung tinggi dapat menyebabkan naiknya harga barang hasil produksi dan untuk harga barang lainnya akan ikut naik. Perlu digaris bawahi bahwa terjadinya inflasi dari naiknya biaya produksi akan barang kebutuhan akan membuat produksi tersebut turun yang nantinya akan menjadi titik awal dari pemecatan karyawan tanpa *skill* mumpuni dan pengangguran semakin banyak.

3) Inflasi Menurut Asalnya³⁹

- a) Inflasi disebabkan oleh negara itu sendiri atau disebut dengan *domestic inflation* merupakan inflasi yang muncul dari dalam negara tersebut tanpa campur tangan dari luar negeri. Terdapat beberapa hal yang membuat dalam negeri tersebut muncul inflasi, antara lain:
 - (1) Jumlah permintaan akan barang konsumsi di pasar melonjak drastis, tetapi dari permintaan tersebut tidak dapat sejajar dengan penawaran barang konsumsi yang ada di pasar.
 - (2) Anggaran belanja yang defisit membuat pemerintah mencetak uang kembali untuk membayarnya.
 - (3) Biaya untuk produksi di dalam negeri meningkat sehingga harga barang yang dijual juga meningkat.
- b) Selanjutnya asal inflasi dari luar negeri atau *foreign inflation*. Berbeda dengan *domestic inflation* yang asal inflasinya dari negeri itu sendiri, *foreign inflation* merupakan inflasi yang terjadi dari adanya faktor luar negeri. Dampak yang disebabkan oleh *foreign inflation* adalah sebagai berikut:

³⁹ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Makro* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 84.

- (1) Biaya hidup yang naik karena barang yang dikonsumsi berasal dari barang import.
 - (2) Harga disemua barang naik karena bahan mentah dan teknologi yang dipakai juga mengalami kenaikan.
 - (3) Karena barang import yang masuk ke negara tersebut harganya tinggi atau melambungkan baik, tentu membuat harga barang dalam negeri ikut naik juga.
- 4) Inflasi Atas Harapan Dari Masyarakat⁴⁰
- a) *Expected Inflation*, besarnya tingkat inflasi yang dapat diperkirakan.
 - b) *Unexpected Inflation*, besarnya tingkat inflasi yang tidak diharapkan akan terjadi atau yang dapat dianggap sebagai penyimpangan besarnya inflasi dari besarnya inflasi yang diharapkan.

f. Kebijakan dalam Mengatasi Inflasi

Dalam ekonomi konvensional, ada tiga langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi inflasi⁴¹. *Pertama*, kebijakan moneter yang ada hubungannya dengan keuangan dan perkreditan. Adanya kebijakan ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan membatasi pinjaman. *Kedua*, kebijakan fiskal yang berhubungan dengan anggaran belanja dan perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan pajak dan menyediakan kredit pemerintah melalui penerbitan surat utang. *Ketiga*, kebijakan non-moneter dan non-fiskal (kebijakan real), kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, menstabilkan upah dan gaji, serta mengontrol distribusi barang dan harga.

Dalam ekonomi Islam, terdapat tiga langkah yang dapat diterapkan untuk mengatasi inflasi. *Pertama*, membatasi pencetakan uang semaksimal mungkin, yaitu mencetak uang hanya untuk transaksi dan dengan nilai nominal yang rendah, agar tidak ditimbun (*hoarding*). *Kedua*, penerapan strategi pengenaan pajak atas uang yang tidak terpakai (*tax on unused money*), pada penerapan ini dapat tercermin dari kebijakan

⁴⁰ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 134.

⁴¹ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 184-186.

yang diterapkan oleh bank sentral, di mana untuk besarnya Giro Wajib Minimum (GWM) ditetapkan berdasarkan pembagian tertentu yang berasal dari Dana Pihak Ketiga pada bank. *Ketiga*, kebijakan fiskal dalam hal investasi, penawaran agregat dan pertumbuhan ekonomi.⁴²

5. Produk Domestik Bruto

a. Pengertian Produk Domestik Bruto

Pada pendapatan nasional terdapat beberapa konsep yang melekat dalam sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu produk domestik bruto yang dikenal juga dengan sebutan *gross domestic product*. Memiliki peran penting sebagai instrumen dalam perhitungan pendapatan nasional, produk domestik bruto adalah suatu nilai yang berasal dari barang maupun jasa yang pembuatannya atau produksinya berada di negara yang bersangkutan untuk jangka waktu yang sudah ditentukan.

Arti lain dari PDB ialah keseluruhan atas nilai barang dan jasa yang produksinya dilakukan oleh semua unit usaha di negara tersebut. Perhitungan PDB dapat dilihat dari hasil produksi yang berupa barang maupun jasa dalam kawasan perekonomian sebuah negara. Di mana produksinya dijalankan oleh warga asli dari negara tersebut atau bahkan warga dari negara asing yang menetap di negara tersebut (tidak melihat kewarganegaraan orang yang melakukan produksi itu).⁴³

Perhitungan dari instrumen pendapatan nasional ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua jenis dasar harga. Dua macam ini yaitu:

- 1) Harga dasar berlaku, dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan saat itu juga. Pada perhitungan ini dilakukan untuk melihat pertumbuhan sektor ekonomi riil pada tahun itu.
- 2) Harga dasar konstan, dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu disetiap tahunnya. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan sektor ekonomi disetiap tahunnya.

b. Indikator Perhitungan Pendapatan Nasional

⁴² Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 141-142.

⁴³ Didit Darmawan, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Surabaya: PT. REVKA PETRA MEDIA, 2018), 18.

Nilai dari pendapatan nasional dapat diketahui dengan merumuskan pada apa saja indikator perhitungannya. Salah satu perhitungan yang dapat dipakai adalah perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Perhitungan itu didasarkan pada hasil atau jumlah permintaan akhir dari semua unit ekonomi, antara lain:

- 1) Pengeluaran dalam bentuk rumah tangga (konsumsi) dapat dirumuskan dengan C atau *Consumption*.

Alasan pengeluaran dari rumah tangga berpengaruh terhadap pendapatan nasional karena, dalam kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga akan berkontribusi pada perhitungan pendapatan nasional dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Rumus yang dapat digunakan dalam mencari tinggi rendahnya pendapatan nasional yang dipengaruhi oleh kegiatan konsumsi rumah tangga yaitu $C = f(Y)$.⁴⁴

Dalam perhitungan pengeluaran nasional yang disebabkan oleh kegiatan konsumsi rumah tangga, terdapat 3 (tiga) jenis kelompok kegiatan tersebut antara lain:

- a) Barang awet: maksud dari barang awet adalah barang yang pemakaiannya lebih dari satu tahun.
 - b) Barang tidak awet: kebalikan dari barang awet, barang tidak awet merupakan barang yang masa pemakaiannya tidak lebih dari 1 tahun bahkan kurang dari 1 tahun. Seperti makanan dan pakaian.
 - c) Jasa: sebuah tawaran dari pihak satu ke pihak lainnya yang membutuhkan dan pada dasarnya tidak berwujud. Seperti seseorang yang ingin berobat akan pergi ke dokter atau sepatu yang sobek akan dibawa ke tukang reparasi sepatu.
- 2) Pengeluaran perusahaan dapat dirumuskan dengan I atau *Investment*.

Dalam perhitungan dengan pendekatan pengeluaran, terdapat investasi yang digunakan sebagai indikator yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Investasi disini lebih dipusatkan pada investasi bruto yang dipakukan oleh perusahaan. Maksudnya adalah jenis investasi yang

⁴⁴ M. Suparmoko dan Eleonora Sofilda, *Pengantar Ekonomi Makro* (Tanggerang: IN Media, 2014), 29.

didasarkan dari jumlah nilai yang ada di pasar atas peralatan dan bangunan yang memiliki jangka waktu panjang atau bertahan lama serta persediaan (*inventory*) yang berubah nilainya dari waktu ke waktu. Contoh dari investasi bruto adalah pembuatan pabrik baru, pembelian mesin baru dan pembelian tambahan persediaan (*inventory*) yang sudah berkurang atau habis. Selain itu investasi bruto dapat berbentuk seperti pembuatan bangunan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut (mess). Intinya investasi yang termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Karena pada dasarnya investasi merupakan pemberian sejumlah uang atau barang untuk modal yang kemudian hari dapat menghasilkan kembalian dari uang atau barang yang sudah diberikan sebagai modal.⁴⁵

3) Pengeluaran dari pemerintah dirumuskan dengan G atau *Government*.

Pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan mereka seperti mesin. Dalam kata lain semua pengeluaran pemerintah hanya untuk pemerintah bukan untuk masyarakat luas. Jika pemerintah melakukan pengeluaran untuk kebutuhan kegiatan menyumbang bagi yang membutuhkan, maka pengeluaran tersebut termasuk pada pengeluaran transfer.⁴⁶ Berikut ini dua contoh yang termasuk pada pengeluaran pemerintah:⁴⁷

- a) Pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan konsumsi dapat berupa belanja tambahan untuk kebutuhan kantor maupun untuk gaji karyawan.
- b) Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi dapat berupa pembangunan jembatan maupun jalan yang rusak.

4) Pengeluaran berupa ekspor dan import dirumuskan dengan X-M atau *Export-Import*.

⁴⁵ M. Suparmoko dan Eleonora Sofilda, *Pengantar Ekonomi Makro* (Tanggerang: IN Media, 2014), 30.

⁴⁶ M. Suparmoko dan Eleonora Sofilda, *Pengantar Ekonomi Makro* (Tanggerang: IN Media, 2014), 31.

⁴⁷ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Makro* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 45.

Penulisan pada indikator ini sering ditulis bersama antara Ekspor (X) dan Impor (M) menjadi (X-M). Penulisan ini merujuk pada ekspor dan import neto, di mana maksud dari penggabungan tersebut adalah tidak hanya barang yang di import maupun di ekspor tetapi juga ekspor dan import jasa. Sebagaimana contoh yang dapat dilihat dari penerbangan menuju Korea Selatan yang pesawatnya diisi oleh orang luar negeri berarti telah melakukan ekspor jasa. Tetapi jika penumpang di pesawat hanya terdapat warga negara Indonesia, maka tidak ada kegiatan ekspor jasa.⁴⁸

Jadi yang dimaksud dengan ekspor neto ialah ekspor yang berupa barang maupun jasa dikurangi dengan import barang dan jasa. Alasan dalam perhitungan pengeluaran pendapatan nasional terdapat import karena masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi produk buatan luar negeri yang berasal dari kegiatan import. Jadi supaya perhitungan pengeluaran nasional benar-benar tercemin dari keadaan negara Indonesia, maka perhitungan ekspor dan import harus dimasukkan dalam ekspor neto.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Dapat juga disebut dengan penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Nafisah Wahyu Fauziah & Segaf	Seberapa Besar Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar Mempengaruhi Deposito Mudharabah di Indonesia.	Variabel bebas: nisbah bagi hasil dan inflasi. Variabel terikat: deposito mudharabah. Pendekatan: kuantitatif dengan	Variabel independen: jumlah uang beredar.	Nisbah bagi hasil berpengaruh tetapi inflasi dan beredarnya uang dengan jumlah yang besar tidak berpengaruh. Secara

⁴⁸ M. Suparmoko dan Eleonora Sofilda, *Pengantar Ekonomi Makro* (Tangerang: IN Media, 2014), 31.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		<i>purposive sampling.</i>		simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap deposito <i>mudharabah</i> . ⁴⁹
Eliana S. Sugiharti, Neni Sri W dan Rumaisah A. A. Adawiyah.	Menganalisis Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Bagi Hasil yang Diduga Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga.	Variabel bebas: inflasi, PDB dan bagi hasil. Variabel terikat: dana pihak ketiga. Pendekatan: kuantitatif.	Metode: analisis regresi data panel.	Produk domestik bruto berpengaruh tetapi inflasi dan bagi hasil tidak mempengaruhi DPK. Sedangkan secara simultan semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. ⁵⁰
Muhammadina	Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil Diduga Mempengaruhi DPK pada Perbankan Syariah di Indonesia.	Variabel bebas: inflasi, BI Rate dan nisbah bagi hasil. Pendekatan: kuantitatif.	Variabel terikat: dana pihak ketiga. Metode: <i>Ex Post Facto</i> .	Inflasi dan BI Rate mempengaruhi namun nisbah bagi hasil tidak berpengaruh. Pada bersama-sama keseluruhan

⁴⁹ Wahyu Fauziah dan Segaf, “SEBERAPA PENGARUH PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL, INFLASI, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH DI INDONESIA,” 28 November 2022.

⁵⁰ Sugiharti, Wulandari, dan Adawiyah, “ANALISIS PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019.”

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. ⁵¹
Caturida Meiwanto D & Fikki Mutarotun Nisha	<i>Mudharabah Deposits Among Conventional Bank Interest Rates, Profit-Sharing Rates, Liquidity and Inflation Rates.</i>	Variabel bebas: bagi hasil dan inflasi. Pendekatan: kuantitatif dengan <i>purposive sampling</i> .	Variabel bebas: likuiditas dan suku bunga konvensional.	Bagi hasil berpengaruh tetapi likuiditas, inflasi dan suku bunga konvensional tidak mempengaruhi. Secara sama-sama semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. ⁵²
Roza Linda	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Saat COVID-19.	Variabel bebas: PDB. Variabel terikat: deposito mudharabah. Pendekatan: kuantitatif dengan <i>purposive sampling</i> .	Variabel bebas: FDR, PSR dan NPF.	<i>Financing deposit ratio</i> dan <i>gross domestic product</i> berpengaruh tetapi <i>profit sharing ratio</i> dan <i>non performing financing</i> tidak berpengaruh. Secara simultan

⁵¹ Muhammdinah Muhammdinah, “INFLUENCE OF INFLATION, BI RATE AND THE RATIO OF THE RESULTS TO THE GATHERING OF THIRD PARTY FUNDS ON SHARIA BANKING IN INDONESIA,” *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 25 Juni 2020, <https://doi.org/10.23969/oikos.v4i2.2850>.

⁵² Doktoralina dan Nisha, “Mudharabah Deposits Among Conventional Bank Interest Rates, Profit-Sharing Rates, Liquidity and Inflation Rates,” 10 Oktober 2019.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				semua variabel independen mempengaruhi deposito <i>mudharabah</i> . ⁵³
Firda Izzati Febrianti	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, FDR dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> .	Variabel bebas: bagi hasil dan inflasi. Variabel terikat: deposito <i>mudharabah</i> . Pendekatan: kuantitatif.	Variabel independen: FDR. Teknik pengambilan data secara sensus.	Secara sendiri maupun sama-sama semua variabel bebas mempengaruhi deposito <i>mudharabah</i> . ⁵⁴
Nandang Nazmudin dan Isroyatul Mubarakah	<i>Profit Sharing</i> , Inflasi, Kurs dan BI Rate seberapa mempengaruhi Deposito <i>Mudharabah</i> .	Variabel independen: <i>profit sharing</i> , inflasi dan BI Rate. Variabel dependen: deposito <i>mudharabah</i> . Pendekatan: kuantitatif.	Variabel independen: kurs. Metode: riset terapan.	Baik sendiri atau sama-sama variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. ⁵⁵
Aura Dimar Sontani dan Dian	Determinan Pertumbuhan Dana Pihak	Variabel bebas: PDB, inflasi dan	Variabel terikat: DPK. Model: regresi	Secara parsial PDB dan inflasi tidak

⁵³ Linda, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA SAAT COVID-19,” 14 Februari 2022.

⁵⁴ Firda Izzati Febriani, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014 – 2017,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2 Maret 2019): 108, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8752>.

⁵⁵ Nandang Nazmudin dan Isroyatul Mubarakah, “Pengaruh profit sharing, inflasi, kurs dan BI rate terhadap kuantitas deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019,” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 12 (25 Juli 2022): 5745–56, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2018>.

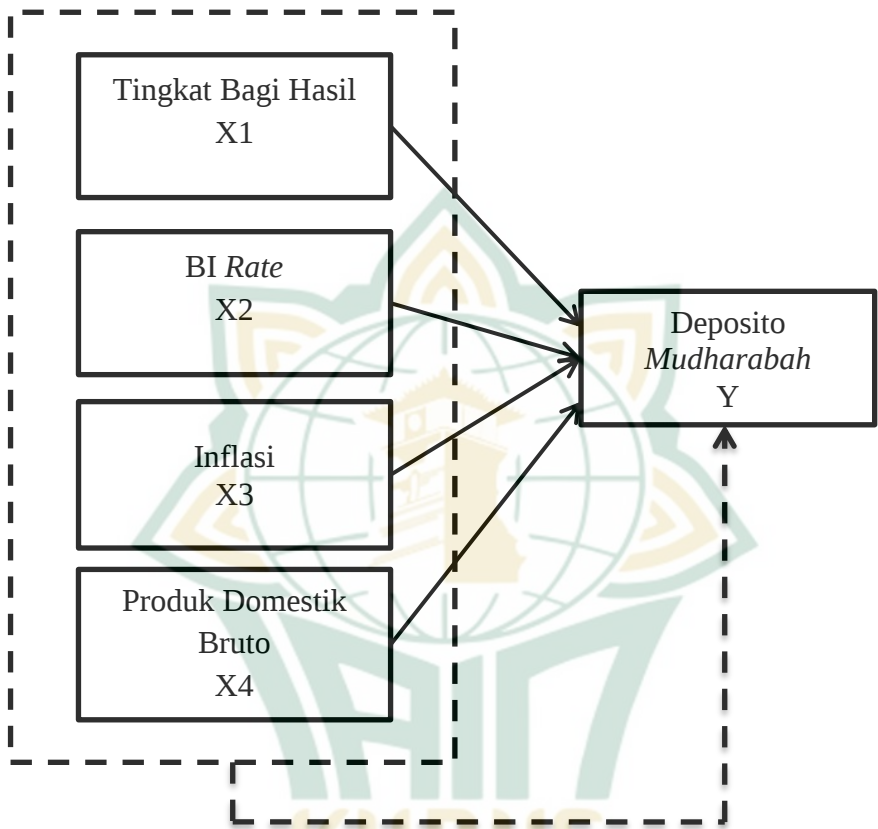
Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Filianti	Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.	tingkat bagi hasil. Pendekatan: kuantitatif.	data panel.	berpengaruh, tetapi bagi hasil berpengaruh terhadap DPK. Saat sama-sama semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. ⁵⁶

C. Kerangka Berfikir

Untuk memahami permasalahan yang sedang diuji, peneliti membuat kerangka berfikir sebagai upaya mempermudah pembaca dalam memahami variabel apa yang ingin diuji pada penelitian ini. Selain itu pada kerangka berfikir dapat dijadikan sebagai landasan dalam mencari, menemukan, mengembangkan bahkan sampai menguji permasalahan yang ingin diuji. Penggambaran kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar di bawah untuk memahami penelitian ini:

⁵⁶ Sontani dan Filianti, “DETERMINAN PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA.”

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



Keterangan :

————— : Uji Parsial

----- : Uji Simultan

Telah tertera pada Gambar 2.1 bahwa kerangka berfikir pada penelitian ini berkaitan dengan variabel bagi hasil, BI Rate, inflasi, dan produk domestik bruto yang akan diprediksikan terhadap deposito *mudharabah*. Dapat dilihat bahwa secara bersama-sama untuk semua variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen deposito *mudharabah*.

D. Hipotesis

Hipotesis memiliki makna “di bawah” dan “kebenaran”. Artinya kebenaran yang ingin ditemukan masih dalam bentuk jawaban sementara dan masih harus melewati tahap pengujian.

Jawaban sementara disini dimaksudkan karena masih berbentuk teori- teori dan masih dapat ditolak atau disanggah jika terbukti tidak benar.⁵⁷

Berdasarkan landasan teori beserta kerangka berfikir di atas peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah*

Menurut teori Klasik yang diutarakan oleh kaum Klasik, keuntungan akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan investasi. Jadi, jika keuntungan yang didapat dalam jumlah yang besar maka semakin tinggi juga jumlah modal dan investasi yang dimilikinya.⁵⁸ Untuk itu pada bank syariah terdapat bagi hasil sebagai sistem pembagian keuntungannya. Sistem yang ditawarkan oleh bank syariah ini jika dalam rasio yang besar tentu dapat mempengaruhi nasabah untuk melakukan investasi (deposito *mudharabah*) di bank syariah tersebut. Tetapi jika pembagian keuntungan ini lebih rendah dari bunga bank, maka nasabah akan lebih memilih berinvestasi di bank konvensional. Teori Klasik tersebut disukung dengan hasil dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Nafisah Wahyu F dan Segaf di mana dalam hasil penelitiannya, diperoleh hasil bahwa nisbah bagi hasil mempengaruhi deposito *mudharabah* secara parsial.⁵⁹ Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut ini atas apa yang sudah teori maupun hasil penelitian terdahulu kemukakan:

H₁ : Secara parsial bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

2. Pengaruh BI Rate terhadap Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan pandangan ahli ekonom Klasik diutarakan bahwa suku bunga yang besar akan berpengaruh kepada jumlah tabungan yang ada di bank. Selain tabungan suku bunga juga dapat mempengaruhi deposito, karena pada dasarnya untuk tingkat bunga pada deposito lebih tinggi dari pada tabungan. Kembali lagi pada teori suku bunga Klasik, mereka

⁵⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 63.

⁵⁸ M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 111.

⁵⁹ Wahyu Fauziah dan Segaf, "SEBERAPA PENGARUH PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL, INFLASI, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH DI INDONESIA," 28 November 2022.

mengemukakan bahwa besarnya suku bunga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan atas tabungan. Jadi, saat suku bunga tinggi akan meningkatkan pula jumlah tabungan dan deposito yang dimiliki.⁶⁰ Tetapi saat suku bunga rendah, masyarakat akan berhenti menabung atau menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito dan lebih memilih menanamkan dananya di bank syariah yang memiliki bagi hasil tinggi. Pandangan kaum Klasik tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa BI Rate berpengaruh terhadap dana pihak ketiga secara parsial.⁶¹ Berdasarkan teori dan hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Secara parsial BI Rate berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Deposito Mudharabah

Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ekonomi Makro” Suparmoko menyebutkan bahwa jika inflasi naik terlalu tinggi dan uang menjadi tidak bernilai maka masyarakat akan menarik uang dari tabungan atau deposito di bank dan lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk tanah, emas, kendaraan atau barang lain, yang tahan lama dan setara nilainya dengan tingkat inflasi yang semakin tinggi (*hoarding*).⁶² Selain itu, pada teori Kuantitas juga menyebutkan bahwa masyarakat akan membelanjakan uangnya dalam bentuk barang guna menghindari kerugian menegang uang. Pernyataan dari ahli dan teori di atas sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Firda Izzati Febrianti bahwa inflasi mempengaruhi deposito mudharabah yang berada di bank syariah.⁶³ Jadi, peneliti mengajukan hipotesis berikut ini yang didasarkan pada teori maupun hasil penelitian terdahulu di atas:

⁶⁰ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 379.

⁶¹ Muhammadiyah, “INFLUENCE OF INFLATION, BI RATE AND THE RATIO OF THE RESULTS TO THE GATHERING OF THIRD PARTY FUNDS ON SHARIA BANKING IN INDONESIA,” *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 25 Juni 2020, <https://doi.org/10.23969/oikos.v4i2.2850>.

⁶² M. Suparmoko dan Eleonora Sofilda, *Pengantar Ekonomi Makro* (Tanggerang: IN Media, 2014), 190.

⁶³ Febriani, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014 – 2017,” 2 Maret 2019.

H₃ : Secara parsial inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

4. Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Deposito *Mudharabah*

Menurut Keynes tingkat nominal tabungan yang dimiliki masyarakat akan tergantung kepada pendapatan dari masing-masing orang tersebut (pendapatan nasional) dan bukan dari suku bunga yang besar rasionya.⁶⁴ Maka dari dasar ini juga berlaku pada deposito *mudharabah*, di mana jika pendapatan masyarakat naik maka terdapat sisa dana yang dapat disimpan dalam bentuk deposito *mudharabah* setelah terpenuhinya konsumsi. Teori ini juga sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Roza Linda di mana dikatakan bahwa PDB mempengaruhi deposito *mudharabah*.⁶⁵ Oleh sebab itu, pengajuan hipotesis berikut ini diutarakan peneliti berdasarkan teori maupun hasil penelitian di atas:

H₄ : Secara parsial produk domestik bruto berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

5. Secara bersama-sama Bagi Hasil, BI Rate, Inflasi, dan Produk Domestik Bruto mempengaruhi Deposito *Mudharabah*

Semua variabel yang ada di penelitian ini berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, seperti yang sudah dijelaskan pada teori maupun hasil dari penelitian terdahulu bahwa tingkat bagi hasil, BI Rate, inflasi dan PDB mempengaruhi deposito *mudharabah*. Dapat dikatakan pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Anniesatun Nurul Aliefah. Bahwa secara simultan semua variabel independen yang diteliti mempengaruhi variabel dependen.⁶⁶ Jadi peneliti mengajukan hipotesis antara lain berupa:

⁶⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 102.

⁶⁵ Roza Linda, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA SAAT COVID-19," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (14 Februari 2022): 71–82, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8961](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8961).

⁶⁶ Anniesatun Nurul Aliefah, "Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar, PDB, Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Bukopin," *lab* 5, no. 01 (30 Juni 2021): 45–70, <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.387>.

H₅ : Bagi hasil, BI Rate, inflasi dan produk domestik bruto secara simultan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

